

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perekonomian Indonesia pasca terjadinya krisis ekonomi nasional tahun 1998 belum memperlihatkan kenaikan yang signifikan. Dimana krisis ekonomi pada masa itu menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Tidak sedikit usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan dan jasa mengalami kebangkrutan. Akan tetapi beda halnya dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) seakan menjadi penolong untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang terlanjur terpuruk pada saat itu. UMKM tidak boleh disepelekan oleh masyarakat Indonesia karena dapat berkembang pesat dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM memiliki peranan penting dalam penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dan UMKM mampu memberikan manfaat sosial yaitu memperbaiki ketidakseimbangan pendapatan, terutama di negara-negara berkembang.¹

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Karakteristik utama UMKM adalah kemampuannya mengembangkan proses bisnis yang fleksibel dengan menanggung biaya yang relatif rendah. Oleh karena itu sangat wajar jika keberhasilan UMKM diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.²

¹ Aditya Ari Wibowo, "Edukasi Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) Bagi Pedagang Kaki Lima Di Jagakarsa Jakarta Selatan." *Jurnal Syukur*, 1 (April, 2018) hlm. 32.

² Sony Warsono, *Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami & Dipraktikan*, (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011), hlm. 5.

Secara umum jumlah pelaku UMKM di Indonesia diperkirakan sebanyak 55 juta. Dari angka itu, sebanyak 45 persen atau 22 juta diantaranya, bekerja sebagai pedagang pasar tradisional. Diantara para pedagang pasar adalah PKL (Pedagang Kaki Lima) yang membuka usaha di tepi-tepi pasar, di pinggir jalan raya, di atas trotoar, disekitar sarana umum, atau di dekat supermarket. Kebanyakan orang memilih untuk bekerja sebagai pedagang kaki lima karena modalnya yang kecil. PKL (Pedagang Kaki Lima) merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sektor informal dalam kegiatan perekonomian kota.³

Menurut Widodo, sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi (*unorganized*), tidak teratur (*unregulated*), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (*unregistered*). Pada kebanyakan negara sedang berkembang, sekitar 30-70% populasi tenaga kerja di perkotaan bekerja di sektor informal.⁴ Dengan demikian, bisa dilihat betapa banyaknya masyarakat Indonesia yang menghidupi keluarganya dari profesi PKL.

Menurut Triyuwono, bahwa kita harus mengkaji akuntansi pinggiran sebagaimana kita mengkaji yang pusat. Akuntansi juga terdapat pada usaha kecil (termasuk pedagang kaki lima). Hanya saja dalam penyajiannya berbeda baik itu pengakuan akuntansi yang diartikan oleh praktisi/ akuntan dengan pengakuan akuntansi yang mereka buat selama ini.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh wirausahawan UMKM adalah terkait dengan pengelolaan dana. Pengelolaan dana yang baik merupakan faktor kunci keberhasilan dari UMKM. Meskipun banyak faktor lain yang

³ Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 238.

⁴ Nurhidayah Sakri, dkk, "Mengungkap Informasi Akuntansi Usaha Kecil (Sebuah Studi Fenomenologi)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 2 (Desember, 2018), hlm. 76.

mempengaruhi UMKM tetapi persoalan-persoalan di UMKM lazimnya muncul akibat kegagalan dari pengelolaan dana. Kesalahan dalam pengelolaan dana yang berupa kas dapat menyebabkan pelaku UMKM secara mendadak mengalami kekurangan uang tunai, untuk menjalankan usahanya. Metode yang tepat dalam pengelolaan dana pada UMKM adalah dengan menerapkan akuntansi dengan baik.

Akuntansi adalah sebuah sistem yang mengolah transaksi menjadi informasi keuangan. Dengan demikian, akuntansi menjadikan UMKM dapat memperoleh berbagai informasi keuangan yang penting dalam menjalankan usahanya. Informasi keuangan yang dapat diperoleh UMKM antara lain informasi mengenai kinerja perusahaan, informasi penghitungan pajak, informasi posisi dana perusahaan, informasi perubahan modal pemilik, informasi pemasukan dan pengeluaran kas, informasi perencanaan kegiatan, dan informasi besaran biaya.⁵

Pencatatan dan pelaporan keuangan sangat berguna untuk proses pengambilan keputusan suatu bisnis untuk melanjutkan usaha mereka. Walaupun dengan menerapkan akuntansi itu merupakan salah satu faktor penting dalam melanjutkan usahanya, tetapi sampai saat ini masih banyak UMKM yang belum menerapkan akuntansi.⁶

Hal tersebut tidak terkecuali juga yang dilakukan oleh UMKM pada PKL di Jl. Niaga (kawasan *sae salera*) Kab. Pamekasan. Kawasan *sae salera* merupakan salah satu kawasan wisata kuliner atau menjual berbagai aneka makanan yang cukup terkenal oleh masyarakat pamekasan. Tepatnya berada di

⁵ Sony Warsono, *Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami & Dipraktikan*, (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011), hlm. 8.

⁶ Elisabeth Penti Kurniawati, dkk, "Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Jurnal: JMK*, 2 (September, 2012) hlm. 1.

dekat pusat kota. Sehingga masyarakat mudah mengunjungi ataupun menjumpai wisata kuliner tersebut.

Jumlah para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pada PKL tersebut cukup banyak yaitu sekitar 62 pedagang kaki lima. Mayoritas pedagang di kawasan *sae salera* tersebut adalah pedagang sate.⁷ Sehingga peneliti memilih pedagang sate untuk dijadikan sebagai informan atau narasumber dari penelitian tersebut. Pedagang kaki lima yang ada di Jl. Niaga (kawasan *sae salera*) Kab. Pamekasan, dikategorikan pada usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan Dimana yang memiliki kriteria jumlah asetnya yaitu kurang dari Rp. 50.000.000 pertahun dan mengenai omzetnya yaitu kurang dari Rp. 300.000.000.⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan ke beberapa kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jl. Niaga (kawasan *sae salera*) Kab. Pamekasan, dapat disimpulkan bahwa para pedagang belum memahami mengenai pembukuan atau akuntansi dalam menjalankan usahanya atau masih menerapkan akuntansi yang sederhana. Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan SAK-EMKM.

Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK-EMKM) merupakan entitas tanpa akutabilitas publik yang signifikan. SAK-EMKM berlaku efektif per 1 Januari 2018.⁹ SAK-EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Dimana dengan adanya SAK-

⁷ Bapak Dodi, Pengelolaan UMKM Kelompok PKL di Jl. Niaga, Wawancara langsung, (Tanggal 28 November 2018).

⁸ Rahmawati, dkk, *Bisnis Usaha Kecil Menengah Akuntansi Kewirausahaan Dan Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), hlm. 74.

⁹ Diajeng Amatullah Azizah Rachmanti, Misrin Hariyadi, Andrianto, "Analisis Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Batik Jumput Dahlia Berdasarkan SAK-EMKM". *Jurnal Balance*, 1 (Januari, 2019) hlm. 32.

EMKM ini dengan prinsip kesederhanaan diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi UMKM dalam penyajian laporan keuangan yang berguna untuk membangun kualitas dari UMKM.

Pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntansi sangat penting bagi para pedagang khususnya pedagang kaki lima. Karena dengan adanya akuntansi tersebut dapat membantu para pedagang untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran dan pendapatannya yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Dimana hal ini diperhitungkan secara rinci dalam sebuah laporan keuangan. Kegiatan akuntansi ini jarang dilakukan oleh para pedagang karena berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai pentingnya akuntansi, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda antara pedagang yang satu dengan yang lainnya, serta keterbatasan waktu dan biaya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Penyajian Laporan Keuangan Pada UMKM Kelompok PKL Di Jl. Niaga (Kawasan *Sae Salera*) Kabupaten Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pencatatan keuangan di kelompok pedagang kaki lima di Jl. Niaga (kawasan *sae salera*) Kab. Pamekasan?
2. Bagaimana proses pencatatan keuangan yang ideal pada kelompok pedagang kaki lima di Jl. Niaga (kawasan *sae salera*) Kab. Pamekasan?

3. Bagaimana penyajian laporan keuangan tersebut jika disajikan pada kelompok pedagang kaki lima di Jl. Niaga (kawasan *sae salera*) Kab. Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pencatatan keuangan di kelompok pedagang kaki lima di Jl. Niaga (kawasan *sae salera*) Kab. Pamekasan?
2. Untuk mengetahui proses pencatatan keuangan yang ideal pada kelompok pedagang kaki lima di Jl. Niaga (kawasan *sae salera*) Kab. Pamekasan?
3. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan tersebut jika disajikan pada kelompok pedagang kaki lima di Jl. Niaga (kawasan *sae salera*) Kab. Pamekasan?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi manfaat baik manfaat secara akademis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang implementasi penyajian laporan keuangan
 - b. Untuk lebih mendukung teori-teori yang sudah ada sehubungan dengan implementasi penyajian laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti dapat menambah pengetahuan dengan praktik di lapangan dan mengetahui tentang implementasi penyajian laporan keuangan, khususnya bagi pedagang kaki lima di Jl. Niaga (kawasan *sae salera*) Kab. Pamekasan.

b. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi atau rujukan, serta menambah khazanah keilmuan dalam memperkaya literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

c. Bagi pedagang kaki lima di Jl. Niaga (kawasan *sae salera*) Kab. Pamekasan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi kelompok pedagang kaki lima untuk mengetahui proses pencatatan keuangan dan manfaat dari menerapkan penyajian laporan keuangan tersebut.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk praktisi lain yang berkeinginan memperdalam pengetahuan mengenai implementasi penyajian laporan keuangan.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai maksud dan judul penelitian Implementasi Penyajian Laporan Keuangan Pada UMKM Kelompok

PKL di Jl. Niaga (kawasan *sae salera*) Kab. Pamekasan, maka perlu kiranya peneliti merumuskan definisi-definisi istilah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan pemiliknya atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan perusahaan tersebut.¹⁰ Laporan keuangan yang diteliti dalam penelitian ini adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah istilah umum dalam ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2008. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria, yaitu aset kurang dari Rp. 50 juta dan omzetnya kurang dari Rp. 300 juta.¹¹
3. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah PKL pada mulanya adalah istilah untuk menyebut penjajah dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu dipakai karena jumlah kaki pedagangnya ada lima, yaitu dua kaki pedagang ditambah tiga kaki gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Belakangan istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di tepi jalan, di tepi pasar, dan di depan toko-toko.¹²

¹⁰ Rahman Pura, *Pengantar Akuntansi I Pendekatan Siklus Akuntansi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 86.

¹¹ Sony Warsono, *Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami & Dipraktikan*, (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011), hlm. 5.

¹² Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional Potret Ekonomi Rakyat Kecil*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 239.